Pemkot Rogoh Rp 18,2 Miliar untuk Penebalan Bantalan Sosial Dampak Kenaikan Harga BBM

https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/12/09/2022/pemkot-rogoh-rp-182-miliar-untuk-penebalan-bantalan-sosial-dampak-kenaikan-harga-bbm/

SOLO – Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran senilai Rp 18,2 miliar untuk penebalan bantalan sosial dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Anggaran dari APBD Kota Surakarta itu digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan pasar murah untuk pengendali inflasi. Menyasar 20 ribu keluarga.

Besaran anggaran untuk penebalan bantalan sosial itu disepakati pada rapat paripurna tentang APBD Perubahan 2022 dengan agenda laporan pembahasan, persetujuan bersama, dan pendapat akhir wali kota.

"Dua persen dari dana transfer umum (DTU) sekitar Rp 4,2 miliar. Kalau masing-masing penerima mendapat Rp 600 ribu anggaran ini hanya bisa menyasar 7 ribu penerima. Makanya kami tambah dari BTT (belanja tidak terduga) sekitar Rp 14 miliar untuk bansos dan pasar murah," beber Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Minggu (11/9).

Meski ingin menyalurkan bantuan dalam waktu dekat, Gibran masih menunggu agar sasaran penerima bansos dari pemkot tepat sasaran. Penerima bansos dari APBD ini adalah warga miskin yang tidak mendapat BLT BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah pusat. Sebab itu, validasi data bakal calon penerima menjadi hal paling penting untuk diverifikasi. Agar tidak ada penerima ganda yang tumpang tindih antara bansos pemerintah pusat dan bansos pemkot.

"Kalau datanya sudah siap tinggal kami salurkan. Saya pikir makin cepat makin baik. Arahan dari pusat memang di Oktober (penyaluran bansos APBD, Red)," beber Gibran.

Selain menyalurkan bansos yang bersumber dari APBD, pemkot akan memanfaatkan anggaran itu untuk pengendalian inflasi karena naiknya sejumlah harga barang pokok. Kemungkinan ini akan diatasi dengan sidak pasar dan pasar murah untuk mengendalikan harga bahan pokok di pasaran.

"Kami ingin menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat sampai akhir tahun. Saya tidak akan memungkiri inflasi pasti akan naik, tapi akan kita imbangi dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo membenarkan bahwa dua persen DTU berupa dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Setelah dihitung jumlahnya Rp 4,2 miliar. Alokasi ini belum bisa dimanfaatkan untuk penyaluran bansos dalam jumlah banyak kepada warga. Sebab itu, pemanfaatannya untuk penebalan bantalan sosialnya ditambah dengan BTT Rp 14 miliar.

Pemanfaatan BTT untuk penebalan bantalan sosial ini sesuai dengan instruksi dari menteri dalam negeri baru-baru ini. Aturannya ada dua. Pertama, dari menteri keuangan terkait penggunaan 2 persen DTU untuk subsidi sektor transportasi dan lainnya. Kemudian aturan menteri dalam negeri terkait penggunaan BTT untuk menekan dan pengendalian inflasi dan bansos.

"Atas dasar ini akhirnya disepakati untuk menambah yang dikeluarkan dari BTT. Kalau hanya mengandalkan DTU tidak akan cukup," terang dia.

Pemanfaatan DTU dan BTT itu diharapkan bisa memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Tentu harus tepat sasaran. **(ves/bun/dam)**